

## EVALUASI KEBIJAKAN *ONE WAY TRAFFIC* DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MANADO

*Loudwik Dody Kaya*<sup>1</sup>  
*Markus Kaunang*<sup>2</sup>  
*Franky Rengkung*<sup>3</sup>

### Abstrak

Di kota Manado yang sudah sangat berkembang dan maju yang bisa dilihat dari makin padatnya kendaraan yang ada di kota Manado. Hal ini sudah sangat lazim ditemui diberbagai ruas jalanan di kota Manado mulai dari tempat-tempat perbelanjaan, perkantoran, bahkan ditempat menuntut ilmu pun semisalnya sekolah sudah sangat padat dengan kendaraan yang dikarenakan sudah melebihi kapasitas dan membuat para pemilik kendaraan mau tidak mau harus memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya dan bahkan parkir di tempat yang nyatanya sudah terpampang jelas rambu lalu lintas dilarang parkir.. Pada bulan februari tahun 2016 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan guna mengatasi kemacetan di kota Manado yang sudah semakin buruk kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan “One Way Traffic” atau jalur satu arah. Jika sebelumnya jalur transportasi dikota manado ada dua arah kini dibuat sesuai namanya jalur satu arah yang mengikuti arah jarum jam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, melalui data yang ada kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasiln penelitian wawancara bersama Kabid. LLAJ Dishub Kota Manado kebijakan ini sudah sangat baik dalam mengurangi kemacetan. Namun menurut supir angkutan umum ini lebih menambah kemacetan akan tetapi b erdasarkan observasi dilapangan kebijakan ini lebih baik dari sebelumnya.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kebijakan Publik, One Way Traffic, Kemacetan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Kebijakan publik sebagai titik awal (starting point) pengoperasian program-program dan/atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, Kebijakan Publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan dan kemunduran suatu Negara-Bangsa. Kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholders lain dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan public, masalah public dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola serta menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada. Berdasarkan pandangan diatas maka implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan menjadi sesuatu yang sangat penting. Implementasi kebijakan pada intinya akan membahas mengenai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan publik yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, dan dampak yang diharapkan. Sementara Evaluasi kebijakan lebih berorientasi pada upaya menilai secara kritis dan cerdas terhadap kebijakan publik, yang akan dan sedang dilakukan. Sejauh mana kebijakan publik tertentu mencapai tujuan, sasaran, dan dampak yang diharapkan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai konsep perencanaan guna meningkatkan kesejahteraan tiap masyarakat. Diwilayah provinsi Sulawesi Utara khususnya kota Manado

kepadatan penduduk memunculkan berbagai masalah sosial khususnya kemacetan. Di kota Manado yang sudah sangat berkembang dan maju yang bisa dilihat dari makin padatnya kendaraan yang ada di kota Manado. Hal ini sudah sangat lazim ditemui diberbagai ruas jalanan di kota Manado mulai dari tempat-tempat perbelanjaan, perkantoran, bahkan ditempat menuntut ilmu pun semisalnya sekolah sudah sangat padat dengan kendaraan yang dikarenakan sudah melebihi kapasitas dan membuat para pemilik kendaraan mau tidak mau harus memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya dan bahkan parkir di tempat yang nyatanya sudah terpampang jelas rambu lalu lintas dilarang parkir.

Kemacetan banyak terjadi dikotakota besar terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan di kota Manado sendiri sudah terbilang masuk dalam tahapan cukup memprihatinkan dan kalau keadaan ini terus di biarkan dan tidak ditanggapi dengan serius maka kita harus isap dengan keadaan terburuk. Terpusatnya aktivitas bisnis, perbankan, perkantoran dan pusat perbelanjaan maupun perumahan yang membuat kemacetan semakin meingkat setiap harinya. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah tersebut telah di implementasikan, namun belum juga berdampak besar bagi penanggulangan kemacetan di kota Manado.

Penyebab kemacetan begitu beragam contohnya :

1. Kendaraan yang melintasi sudah melebihi kapasitas

2. Terjadi kecelakaan dan para warga yang menonton membuat jalanan tersendat
3. Terjadi banjir sehingga kendaraan memperlambat jalan (mesin mati ditengah jalan)
4. Ada perbaikan jalan
5. Bagian jalan tertentu yang rusak dan belum sempat diperbaiki
6. Adanya parkir liar
7. Pengaturan lampu lalu lintas yang kadang tidak berfungsi
8. Kendaraan yang melawan arah jalan
9. Menurunkan penumpang di tengah jalan (angkutan umum)

Pada bulan februari tahun 2016 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan guna mengatasi kemacetan di kota Manado yang sudah semakin buruk kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan "One Way Traffic" atau jalur satu arah. Jika sebelumnya jalur transportasi di kota manado ada dua arah kini dibuat sesuai namanya jalur satu arah yang mengikuti arah jarum jam. Pada tahap awal implementasinya kebijakan "one way Traffic" ini mengundang keluhan dari seluruh masyarakat manado baik itu pengguna jalan, penumpang mikrolet maupun supir mikrolet dengan berbagai argument serta alasan lainnya. Berbagai alasan diutarakan masyarakat seperti : waktu tempuh bertambah karena jarak semakin jauh da terjebak macet, bahkan para pekerja-

## Tinjauan Pustaka

Kata Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Kebijakan juga bisa diartikan sebagai cara bertindak yang sengaja dilaksanakan

untuk menyelesaikan masalah-masalah. Menurut Carl Friedrich (Deddy Mulyadi, 2016: 24) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan Kent (Solichin Wahab, 2016:40) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut. "That kind of systematic, disciplined, analytical, scholarly, creative study whose primary motivation is to produce well-supported recommendations for action dealing with concrete political problems" (sejenis studi sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif, yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret). Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (2012: 31) dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan Pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan Teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal) pemberian angka (rating)

dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan untuk produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Dedy Mulyadi, 2016:85). Dunn mengatakan (Dedy Mulyadi, 2016:86) Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas-jelas di atasi.

Konsep Good Governance mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama, yaitu pemerintah, Korporasi, dan masyarakat sipil yang saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan public dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan disuatu negara. Tanpa Good Governance sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi. (Dedy Mulyadi, 2016:129). Good governance tidak akan tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi boomerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah, korporasi dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Zuriyah (2006:47) penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis. Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Kota Manado yaitu kebijakan "One Way traffic" atau jalur satu arah dalam mengatasi kemacetan dikota manado. Sesuai dengan penjelasan diatas, bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hendarso (Usman 2009:56) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam

permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan Informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Berdasarkan penjelasan yang diatas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado
- 4 sopir angkot

## Hasil Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kinerja diartikan sebagai Sesuatu yang dicapai, Prestasi yang diperlihatkan dan juga kemampuan kerja. Dalam teori Subarsono ini dikaitkan dengan penelitian ini maka ini menilai tingkat kinerja dari kebijakan "One way Traffic" atau jalur satu arah ini. Sesuatu yang dicapai juga bisa dikatakan sebagai hasil yang di dapatkan dari kebijakan "One way traffic" atau jalur satu arah ini. Bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Juga kemampuan kerja yang berarti membahas tentang kemampuan kerja dari kebijakan "One way Traffic" ini bagaimana kemampuannya dalam mengurangi kemacetan. Berdasarkan tingkat kinerja dari kebijakan "One way Traffic" ini bahwa tujuannya dalam mengurangi kemacetan seperti yang dikatakan oleh bapak Donald Wilar, selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa dari segi kelancaran kebijakan ini jauh lebih lancar dari jalur transportasi yang sebelumnya yaitu dua arah. Walaupun katanya: "awal pertama pemberlakuan resistensi masyarakat sangat luar biasa baik dari sopir maupun masyarakat pengguna jasa, ya mungkin karena baru jadi harus ada yang namanya adaptasi." Memang awalnya pemberlakuan

kebijakan ini mendapat respon yang negative dari seluruh masyarakat, itu terlihat dimana mereka kebingungan untuk mencari angkot dikarenakan sudah dikeluarkan kebijakan satu arah, dan mereka pun harus berjalan kaki tidak seperti biasanya. Itu yang membuat masyarakat awalnya mengeluh dengan adanya kebijakan jalur satu arah ini. Namun pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat para sopir angkutan umum yang diwawancarai mereka mengatakan yang sebaliknya yaitu mereka lebih menyukai jalur yang lama yakni jalur dua arah. Dan juga mereka merasa bahwa dengan adanya kebijakan jalur satu arah ini kemacetan lebih bertambah. Seperti kata bapak Dion supir jurusan 45 – Sario Kampus: "sekarang titik rawan macet sudah lebih banyak. Masih lebih baik jalur dua arah." Tapi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan atau observasi dilapangan yang terlihat yang mengalami kemacetan hanyalah satu titik yaitu dibagian zero point karena semua jalur angkutan umum dipusatkan di zero point, wajar bila daerah zero point mengalami kemacetan. Namun lepas dari daerah zero point sudah tidak lagi macet, tidak seperti yang dikatakan oleh para sopir angkutan umum bahwa sekarang titik macet itu lebih banyak dari sebelumnya. Melihat dari hasil penelitian dan juga hasil yang dilihat ketika turun dilapangan, sebagai peneliti sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bapak Donald Wilar. Bahwa kebijakan 'One way Traffic' atau jalur satu arah ini lebih dari segi kelancaran jauh lebih baik dari pada jalur yang sebelumnya yaitu dua arah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efisien artinya adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak

membuang-buang waktu (tenaga, biaya) dan juga mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, tepat guna, sangkil. Artinya, dalam hal ini atau dalam penelitian ini efisien dalam teori dari Subarsono adalah melihat apakah kebijakan “One Way Traffic” atau jalur satu arah ini apakah sudah tepat atau belum dalam mencapai tujuannya yaitu dalam hal ini adalah mengurangi kemacetan dikota Manado. Dan juga melihat apakah kebijakan ini adalah tepat atau sesuai untuk dikerjakan juga tetap dijalankan dan juga berdaya guna dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Yang pasti salah satu point inti dari pembuatan kebijakan adalah menilai secara menyeluruh tingkat efisiensi suatu kebijakan. Efisien. Dalam wawancara dengan kepala bidang lalu lintas angkutan jalan bahwa kebijakan “One way traffic atau jalur satu arah ini jelas lebih efisien dalam mengatasi kemacetan karena tujuannya adalah mengurangi kemacetan. Bukan hanya itu, beliau juga mengatakan kebijakan jalur satu arah ini juga berdampak positif karena mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dalam tiga bulan pertama saat pemberlakuan kebijakan jalur satu arah. Dan berdasarkan fakta yang didapati saat observasi langsung dilapangan, dengan adanya jalur satu arah ini, kemacetan sedikit berkurang, walaupun macet, macet dalam keadaan kendaraan berjalan pelan. Dan bisa dikatakan memang kebijakan ini sangat efisien dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dan berdasarkan pengamatan atau observasi dilapangan tingkat efisiensi atau keefektifan dari kebijakan “One way Traffic” atau jalur satu arah ini terbilang efektif. jika dilihat kemacetan itu hanya terjadi dari belakang Golden sampai di zero point.

Kata dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dalam teori dari Subarsono yaitu melihat dampak dari kebijakan ini juga merupakan fokus dari penelitian ini yaitu melihat dampak yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan “One Way Traffic” atau jalur satu arah ini. Dalam wawancara bersama Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu bapak Donal Wilar, ia mengatakan: “untuk dampak pastinya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu kelancaran, bisa dilihat bahwa jalur satu arah ini jauh lebih lancar dibandingkan jalur sebelumnya yaitu dua arah. Dan juga tingkat kecelakaan berkurang dengan adanya kebijakan jalur satu arah ini. Untuk dampak negatifnya ada para pelanggar-pelanggar aturan yang suka lawan arah agar lebih cepat sampai pada tujuan, namun itu hanya terjadi ketika sudah larut malam ketika sudah tidak ada lagi petugas yang dijalan.” Itu dampak yang terjadi menurut kaca mata dari pemerintah dalam hal ini unit pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan. Akan tetapi setelah turun lapangan dan juga observasi ternyata ada dampak lain yang ditimbulkan dari kebijakan “One Way Traffic” atau jalur satu arah ini yang tidak dilihat oleh pemerintah. Berdasarkan hasil dari penelitian dan observasi dilapangan kebijakan jalur satu arah ini memang efektif dalam mengurangi kemacetan. akan tetapi dampak yang ditimbulkan adalah:

- Penumpang atau pengguna jasa angkutan umum lebih susah jika ingin kemana-mana. Contohnya biasanya jika ingin pergi ke megamall, MTC dan sebagainya itu jika naik angkutan kota kita turun langsung dimuka

megamall tapi sekarang ini harus berjalan kaki. Begitupun sebaliknya jika dari megamall atau MTC juga dari Mantos (manado town square) harus berjalan lagi untuk dapat angkot. Tidak heran banyak anak muda yang menggunakan jasa angkutan online seperti Gojek dan Gokar. Bukan masalah lebih murah tapi masyarakat condong lebih memilih untuk keluar uang daripada berjalan kaki terutama anak muda.

- Karena sebagian besar masyarakat lebih memilih kendaraan online maka ini berdampak pada pendapatan para sopir angkutan kota yang menurun sampai ada yang sengaja berhenti walaupun membuat kemacetan demi mendapat kan penumpang. Bahkan mereka terlihat tidak mematuhi lagi polisi yang ada, bila disuruh jalan mereka tetap akan berhenti untuk mendapatkan penumpang. Itu merupakan dampak yang bisa dilihat ketika dilapangan saat mengadakan wawancara dan observasi. Seperti kata para sopir angkutan umum: “sekarang kami cari uang sudah lebih susah ketika diganti jalur. Kami harus keluar dari subuh agar dapat kecukupan, kalau biasanya dalam satu hari kami bisa dapat sampai 200 ribu per hari, tapi sekarang sudah tidak sampai. Itu yang membuat kami mengadakan aksi agar jalur dikembalikan seperti semula.”

Dalam penelitian ini harapannya suatu kebijakan yang diterapkan benar-benar berdasarkan bukan hanya pertimbangan dari satu pihak tetapi juga pihak yang terkait misalnya masyarakat yang catatannya adalah pengguna jasa. Dalam wawancara bersama Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bapak Donald Wilar, ia mengatakan bahwa mereka hanya melakukan uji coba selama tiga bulan sebelum

memutuskan untuk kebijakan ini menjadi prosedur tetap. Dalam diskusi mereka juga mengundang Walikota dan Gubernur jadi ini juga sudah melibatkan provinsi.

## Kesimpulan

1. Derajat Pencapaian Kebijakan One Way Traffic, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa dari derajat pencapaian tujuan, kebijakan “One Way Traffic” atau jalur satu arah ini dari kaca mata pemerintah sudah cukup baik kinerjanya dalam mengurangi kemacetan oleh karena itu kebijakan ini dipertahankan dan dibuat menjadi prosedur tetap dari kepolisian. Yang terjadi kemacetan hanya pada area sekitar dari titik temu semua jurusan angkutan kota yaitu zero point.

Macet yang terjadi karena para supir angkutan umum disitu berhenti untuk mencari penumpang, mereka sebenarnya sudah punya jalur sendiri untuk mengangkut penumpang yaitu dijalur sebelah kiri, akan tetapi banyak dari para sopir angkutan umum ini malah mengambil penumpang dijalur sebelah kanan (jalur cepat) yang bukan lajur angkot dan dilarang untuk mngangkut penumpang. Mungkin ini juga adalah salah satu penyebab kemacetan lebih parah yang harus diperhatikan juga oleh para pemerintah, dimana juga ditempat tersebut ada pihak kepolisian tetapi seperti hanya menjadi pajangan, tidak bisa melarang para supir angkutan umum tersebut.

2. Tingkat Efisiensi dari Kebijakan One Way Traffic, dari tingkat efisiensi atau dengan kata lain tingkat ketepatan dalam mengatasi masalah, kebijakan “one Way Taffic” sudah terbilang cukup bagus. Hanya saja

ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah selain mengatur kelancaran jalur transportasi. Yaitu seperti pembatas jalan, terlihat juga sekarang para pejalan kaki di area zero point tidak bisa seperti biasanya yang bisa menyeberang jalan, sekarang sudah dibuat banyak pembatas yang terlihat membuat para pengguna jalan kurang nyaman karena harus berputar untuk mencari kendaraan. Disisi lainnya juga yang tidak diperhatikan pemerintah adalah parkir liar, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya pada bab I salah satu penyebab kemacetan adalah karena adanya parkir liar. Salah satu masalah ini juga adalah merupakan masalah kecil yang berdampak besar yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terbukti dari beberapa tempat diruas jalan kota Manado banyak kendaraan yang parkir disembarang tempat.

3. Dampak Dari Kebijakan One way Traffic, dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan jalur satu arah ini yang sudah dipaparkan diatas terlihat pemerintah hanya fokus pada kebijakan tersebut, bahkan dengan adanya para petugas dari Dinas perhubungan dan pihak kepolisian di jalan itu hanya untuk mengatur lalu lintas agar tidak macet akan tetapi karena terlalu fokus dimacet mereka tidak melihat dampak-dampak yang telah ditimbulkan. seperti tadi contohnya parkir liar.

## Saran

1. Dari tingkat derajat pencapaian dan Tingkat Efisiensi, unit pelaksana baik Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian harus lebih baik lagi dalam mengatur kelancaran lalu

lintas seperti di depan Multi mart Zero point yang di sebelah kiri itu masih banyak angkutan umum yang mengangkut dan menurunkan penumpang padahal itu jalur cepat dan dilarang untuk mengangkut penumpang akan tetapi demi mendapatkan penumpang para, juga mereka suka berhenti disembarang tempat jika ada penumpang yang ingin naik atau turun.

Manfaatkan kembali halte yang sudah ada. Gunakan kembali menjadi tempat masyarakat untuk naik turun angkutan kota karena cocok dengan jalur saat ini yaitu jalur satu arah agar para sopir angkutan umum tidak seandainya berhenti untuk menarik penumpang.

2. Dari tingkat Efisiensi, dari tingkat efisiensi seperti kesimpulan diatas sudah terbilang tepat dalam mengatasi kemacetan akan tetapi pihak pemerintah harus lebih teliti lagi dalam mengatasi kemacetan yaitu dari penyebab kemacetan salah satunya parkir liar seperti di Belakang Jumbo, Jembatan Soekarno, di depan Gramedia, depan SMA Rex Mundi serta di Jalan-jalan area Sam Ratulangi banyak yang parkir disembarang tempat. Ini mungkin masalah kecil akan tetapi akan berdampak besar dalam bertambahnya kemacetan.
3. Dari segi Dampak yang ditimbulkan, dari dampak yang timbul akibat dari kebijakan jakur satu arah ini maka pemerintah agar mengatur dengan baik untuk arah pejalan kaki. Terlihat di area zero point banyak yang rela melewati pembatas jalan dari pada berjalan jauh untuk pergi ke sebelah. Lucunya disini bukan hanya kendaraan saja yang macet akan tetapi para pejalan kaki di trotoar pun sampai tersendat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Said Zainal, 2012, Kebijakan Publik, Jakarta, Salemba Humanika.
- Afrizal, M.A 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Upaya mendukung penelitian kualitatif. PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Agustino Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta CV. Bandung.
- Mulyadi, Dedy. Mei 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan public. Alfabeta CV Bandung.
- Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo
- Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tahir Arifin, 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta CV, Bandung.
- Usman, Husaini, 2009. Metodologi penelitian sosial (Edisi kedua). Jakarta Bumi Aksara.
- Wahab Solichin, 2016. Analisis Kebijakan. Jakarata, PT. Bumi Aksara
- Zuriah, Nurul, 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori aplikasi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Peraturan Walikota Manado Nomor 15 Tahun 2017 Tentang “Rute trayek angkutan Kota di Kota Manado.